

**PENGARUH PENERAPAN SISTEM INFORMASI AKUNTANSI TERHADAP
AKUNTABILITAS PENDAPATAN PAJAK DAERAH DI DINAS
PENDAPATAN
DAERAH KOTA BANDUNG**

R.Fenny Syafariani & Evi Feryani

Abstrak

Penelitian ini dilakukan pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Bandung yaitu salah satu lembaga pemerintahan daerah yang bergerak di bidang pendapatan-pendapatan asli daerah. Fenomena yang terjadi dalam perkembangan sektor publik di Indonesia dewasa ini adalah menguatnya tuntutan akuntabilitas atas lembaga-lembaga publik, baik di pusat maupun daerah. Akuntabilitas memerlukan dukungan sistem informasi akuntansi yang memadai untuk terselenggaranya pelaporan yang baik. Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui pengaruh penerapan sistem informasi pengaruhnya terhadap akuntabilitas pendapatan pajak daerah pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Bandung.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif dan verifikatif. Untuk mengetahui pengaruh penerapan sistem informasi akuntansi terhadap akuntabilitas pendapatan pajak daerah digunakan pengujian statistik. Pengujian statistik yang digunakan adalah perhitungan korelasi Pearson, analisis regresi, koefisien determinasi, uji hipotesis, uji Validitas, uji reliabilitas dan juga menggunakan aplikasi SPSS 12.0 for windows.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa Penerapan sistem informasi akuntansi pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Bandung menunjukkan kriteria Baik. Akuntabilitas pendapatan pajak daerah pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Bandung sudah termasuk dalam kategori baik. serta Terdapat hubungan yang erat dan searah antara sistem informasi akuntansi dengan akuntabilitas pendapatan pajak daerah pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Bandung yaitu dengan diketahui H_0 ada pada daerah penolakan berarti H_1 diterima atau sistem informasi akuntansi berpengaruh terhadap akuntabilitas pendapatan pajak daerah pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Bandung.

Kata kunci: Akuntabilitas, metode deskriptif, verifikatif, pajak, analisis korelasi, regresi, determinasi.

I.PENDAHULUAN

1.1 Latarbelakang masalah

Perkembangan akuntansi sektor publik, khususnya di Indonesia semakin pesat dengan adanya era reformasi dalam pelaksanaan kebijakan pemerintah otonomi daerah dan desentralisasi fiskal yang menitikberatkan pada Pemerintah Daerah. Selain itu, maraknya globalisasi yang menuntut daya saing di setiap negara juga menuntut daya saing di setiap Pemerintah daerahnya. Daya saing Pemerintah Daerah ini diharapkan akan tercapai melalui peningkatan kemandirian Pemerintah Daerah yang dapat diraih melalui adanya otonomi daerah.

Undang-undang No. 32 tahun 2004 sebagai pengganti Undang-undang No. 22 tahun 1999 tentang pemerintah daerah dan Undang-undang No. 33 tahun 2004 sebagai pengganti Undang-undang No. 25 tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah menjadi landasan yuridis bagi pengembangan Otonomi Daerah di Indonesia. Otonomi daerah merupakan upaya pemberdayaan daerah dalam pengambilan keputusan daerah secara lebih leluasa untuk mengelola sumber daya yang dimiliki sesuai dengan kepentingan, prioritas, dan potensi daerah sendiri. Dengan adanya otonomi daerah, pengelolaan keuangan sepenuhnya berada ditangan pemerintah daerah. Sejalan dengan pelaksanaan otonomi daerah, diperlukan sistem akuntansi yang baik, karena sistem akuntansi merupakan pendukung terciptanya pengelolaan keuangan daerah yang *accountable*, dalam rangka mengelola dana dengan sistem desentralisasi secara transparan, efisien, efektif, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Adanya pemborosan waktu kerja menjadi masalah di Dipenda dalam pengelolaan pajak daerah, dikarenakan masih menggunakan sistem manual serta penggunaan sistem yang terkomputerisasi belum digunakan secara maksimal.

Peranan sistem informasi terhadap kemajuan organisasi sudah tidak diragukan lagi. Dengan dukungan sistem informasi yang baik maka sebuah perusahaan akan memiliki berbagai keunggulan kompetitif sehingga mampu bersaing dengan perusahaan lain.

Sistem Informasi Akuntansi mengacu pada PP 58 tahun 2005 dan Permendagri 13 tahun 2006 dan Permendagri 59 Tahun 2007. Sistem ini berbasis pada jaringan komputer, yang mampu menghubungkan dan mampu menangani konsolidasi data antara SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) dengan SKPKD (Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah), sehingga data di Pemerintah Daerah dapat terintegrasi dengan baik. Sistem Informasi Akuntansi merupakan sistem akuntansi yang berbasis *relational database* dengan pola *database* tersentralisir (*centralized single database*) yang dapat diakses oleh seluruh unit.

Adapun manfaat penerapan sistem informasi akuntansi berdasarkan standar akuntansi pemerintahan adalah bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas dan keandalan pengelola keuangan pemerintah melalui penyusunan dan pengembangan standar akuntansi pemerintahan.

Fenomena yang terjadi dalam perkembangan sektor publik di Indonesia dewasa ini adalah menguatnya tuntutan akuntabilitas atas lembaga-lembaga publik, baik di pusat maupun daerah. Akuntabilitas dapat diartikan sebagai bentuk kewajiban mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya, melalui suatu media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik (Stanbury, 2003).

Fenomena yang terjadi diatas menunjukkan bahwa semakin menguatnya tuntutan masyarakat terhadap pelaksanaan akuntabilitas publik oleh organisasi pemerintah, baik Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah. Berkenaan dengan hal tersebut, penciptaan akuntabilitas publik harus dilaksanakan dalam akuntansi pemerintahan untuk dapat menciptakan *good governance*. *Good governance* sering diartikan sebagai pemerintahan yang baik dimana penyelenggaraan manajemen pembangunan yang bertanggung jawab dan sejalan dengan prinsip demokrasi dan pasar yang efisien, penghindaran salah alokasi dana investasi, pencegahan korupsi baik secara politik maupun administratif, dan menjalankan disiplin anggaran.

Arus reformasi yang terjadi saat ini juga menyebabkan tuntutan yang beragam tentang pengelolaan pemerintah yang baik (*good government governance*). Tuntutan transparansi publik, kinerja yang baik dan akuntabilitas sering ditujukan kepada

pemerintah daerah. Suatu sistem informasi pengelolaan keuangan daerah yang baik dalam rangka mengelola dana dengan sistem desentralisasi yang dapat dipertanggungjawabkan sangat diperlukan.

Pendapatan Pajak Daerah (PAD) adalah penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Mengingat pendapatan pajak daerah merupakan suatu bentuk peran masyarakat maka harus ada suatu pertanggungjawaban Pemerintah Daerah kepada masyarakat melalui transparansi dan akuntabilitas pada proses administrasi dan dalam pengelolaannya yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah.

Dengan diterapkannya Sistem Informasi Akuntansi diharapkan akuntabilitas dalam pengelolaan pendapatan pajak daerah dapat tercapai sehingga pemerintah dapat mempertanggungjawabkan kepada masyarakat, dan pada akhirnya dapat mengalokasikan dana yang tersedia untuk dapat meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan pembangunan daerah.

1.2 Identifikasi dan Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah, maka dapat di identifikasikan suatu masalah yang akan diteliti adalah sebagai berikut:

1. Belum efektifnya penggunaan sistem informasi akuntansi yang diterapkan.
2. Belum tercapai akuntabilitas Dinas Pendapatan Daerah terhadap publik terutama atas pelaporan keuangannya pada hasil pendapatan pajak daerah dikarenakan sistem pencatatan yang diterapkan masih kurang optimal sehingga transparansi dan pertanggungjawaban tidak sepenuhnya tercapai.

Adapun rumusan permasalahan yang akan dibahas sebagai berikut:

1. Bagaimana Penerapan Sistem Informasi Akuntansi yang sedang berjalan di Dinas Pendapatan Daerah Kota Bandung.
2. Bagaimana Akuntabilitas Pendapatan Pajak Daerah di Dinas Pendapatan Daerah Kota Bandung.
3. Seberapa besar pengaruh Penerapan Sistem Informasi Akuntansi terhadap Akuntabilitas Pendapatan Pajak Daerah di Dinas Pendapatan Daerah Kota Bandung.

1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian

Maksud penelitian yang dilakukan adalah untuk mengetahui seberapa besar “Pengaruh Penerapan Sistem Informasi akuntansi terhadap Akuntabilitas Pendapatan Pajak Daerah” pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Bandung. Sedangkan tujuannya adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui Penerapan Sistem Informasi Akuntansi yang sedang berjalan di Dinas Pendapatan Daerah Kota Bandung.
2. Untuk mengetahui Akuntabilitas Pendapatan Pajak Daerah di Dinas Pendapatan Daerah Kota Bandung.

1.4 Manfaat dari penelitian

Dapat dijadikan sebagai sumber referensi dan tambahan informasi bagi peneliti selanjutnya tentang penerapan Sistem Informasi Akuntansi dalam sektor publik. Dan juga sebagai bahan pertimbangan di masa yang akan datang mengenai penerapan praktik Sistem informasi Akuntansi, terutama dalam sistem pencatatannya sehingga dapat menghasilkan laporan realisasi pendapatan yang akuntabel pada dinas pendapatan pajak daerah.

1.5 Batasan Masalah

Yang menjadi batasan masalahnya adalah fokus pada sistem informasi akuntansi keuangan daerah mengenai pajak daerahnya, dan yang menjadi respondennya adalah karyawan dibagian keuangan dan pendapatan pajak.

II. LANDASAN TEORI

2.1 Pengertian Sistem Informasi Akuntansi

Menurut Kusri (2007:10) Sistem Informasi Akuntansi adalah: "sebuah sistem informasi yang mengubah data transaksi bisnis menjadi informasi keuangan yang berguna bagi pemakainya.

2.2 Akuntabilitas

Akuntabilitas merupakan bagian dari unsur *good government governance* disini maksudnya dalam menjalankan pemerintahan, pemerintah mengungkapkan hal-hal yang sifatnya material secara berkala kepada pihak-pihak yang memiliki kepentingan untuk itu, dalam hal ini yaitu masyarakat luas.

Akuntabilitas merupakan konsep yang luas yang mensyaratkan entitas memberikan laporan mengenai penguasaan atas uang-uang publik dan kinerjanya. Akuntabilitas dapat dibedakan dalam beberapa jenis dan informasi tertentu dapat relevan dalam cara yang berbeda untuk memperoleh *judgement* mengenai akuntabilitas.

Mardiasmo (2002:20) mengatakan bahwa akuntabilitas publik adalah: "Akuntabilitas publik adalah kewajiban pihak pemegang amanah (*agent*) untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan, dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggungjawabnya kepada pihak pemberi amanah (*principal*) yang memiliki kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban tersebut."

Akuntabilitas publik yang harus dilakukan oleh organisasi sektor publik terdiri atas beberapa dimensi. Ellwood yang dikutip oleh Mardiasmo(2002:21), menjelaskan terdapat empat dimensi akuntabilitas yang harus dipenuhi oleh organisasi sektor publik, yaitu:

1. Akuntabilitas kejujuran dan Akuntabilitas hukum (*accountability for probity and legality*)
2. Akuntabilitas proses (*process accountability*)
3. Akuntabilitas program (*program accountability*)
4. Akuntabilitas kebijakan (*policy accountability*)

2.3 Pendapatan Pajak Daerah

Mardiasmo (2003:98) menyatakan bahwa pajak daerah adalah: "Pajak daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan

langsung yang seimbang yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan Pembangunan Daerah.”

Dasar hukum pemungutan Pajak Daerah adalah Undang-undang No. 18 Tahun 1997 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No. 34 Tahun 2000.

2.4 Sumber-sumber Pendapatan Pajak Daerah

Mardiasmo (2002:98) menyatakan bahwa pajak daerah dibagi menjadi dua bagian yaitu

1. Pajak Propinsi

2. Pajak Daerah

Berdasarkan hal tersebut diatas, maka

1. Pajak Propinsi, terdiri atas:
 - a. Pajak kendaraan bermotor dan kendaraan diatas air
 - b. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dan Kendaraan diatas air
 - c. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor
 - d. Pajak pengambilan dan pemanfaatan air bawah tanah dan air permukaan

Pajak Kabupaten/Kota, terdiri atas:

- a. Pajak Hotel
- b. Pajak Restoran
- c. Pajak Hiburan
- d. Pajak Reklame
- e. Pajak Penerangan Jalan
- f. Pajak Sewa Menyewa/kontrak rumah dan/atau bangunan
- g. Pajak Galian Golongan C
- h. Pajak Lain-lain

Dalam hal ini yang akan dibahas adalah yang berkaitan dengan Pendapatan Pajak Daerah Kabupaten/kota.

2.5 Kerangka Pemikiran

Yang menjadi variabel independennya adalah **sistem informasi akuntansi** dimana menurut Ade,2010 seksi data yaitu :

1. Pengumpulan, pemasukan dan pengolahan data transaksi.
2. Penyimpanan data transaksi
3. Pemberian informasi
4. Pengawasan

Sedangkan yang menjadi variabel dependennya adalah **akuntabilitas**. Menurut Mardiasmo, 2002,Akuntansi Sektor Publik bahwa akuntabilitas itu terdiri dari :

1. Akuntabilitas kejujuran dan hukum
2. Akuntabilitas proses
3. Akuntabilitas program
4. Akuntabilitas kebijakan

III. METODE PENELITIAN

Metode penelitian merupakan cara penelitian yang digunakan untuk mendapatkan data untuk mencapai tujuan tertentu. Menurut Sugiyono (2009:3) Metode Penelitian adalah :

“Metode penelitian diartikan sebagai cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu”.

Dalam melakukan penelitian peneliti menggunakan metode penelitian studi kasus dan metode deskriptif dan verifikatif, menurut Sugiyono(2005 : 21) mendefinisikan bahwa :

“Metode Deskriptif adalah metode yang digunakan untuk menggambarkan atau menganalisis suatu hasil penelitian tetapi tidak digunakan untuk membuat kesimpulan yang lebih luas”.

Metode deskriptif ini merupakan metode yang bertujuan untuk mengetahui sifat serta hubungan yang lebih mendalam antara dua variabel dengan cara mengamati aspek-aspek tertentu secara lebih spesifik untuk memperoleh data yang sesuai dengan masalah yang ada dengan tujuan penelitian, dimana data tersebut diolah, dianalisis, dan diproses lebih lanjut dengan dasar teori-teori yang telah dipelajari sehingga data tersebut dapat ditarik sebuah kesimpulan.

Sedangkan metode verifikatif menurut Mashuri (2008:45) menyatakan bahwa : “Penelitian verifikatif yaitu memeriksa benar tidaknya apabila dijelaskan untuk menguji suatu cara dengan atau tanpa perbaikan yang telah dilaksanakan di tempat lain dengan mengatasi masalah yang serupa dengan kehidupan .”

Dengan menggunakan metode penelitian akan diketahui hubungan yang signifikan antara variabel yang diteliti sehingga menghasilkan kesimpulan yang akan memperjelas gambaran mengenai objek yang diteliti.

3.1 Operasional Variable

Sebelum mengadakan penilaian dalam penelitian, peneliti harus menentukan operasional variabel, hal ini dimaksudkan agar dapat mempermudah dalam melakukan penelitian. Menurut Sugiyono (2009:60) menerangkan bahwa:

“Variabel penelitian pada dasarnya adalah sesuatu yang berbentuk apa saja yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari sehingga diperoleh informasi tentang hal tersebut, kemudian ditarik kesimpulannya.”

Berikut **tabel operasional variabelnya** :

Tabel 1 Operasional Variabel

Variabel	Konsep Variabel	Indikator	Ukuran	Skala Pengukuran
----------	-----------------	-----------	--------	------------------

Sistem Informasi Akuntansi (Variabel X)	” sebuah sitem informasi yang mengubah data transaksi bisnis menjadi informasi keuangan yang berguna bagi pemakainya.” (Kusrini dan Andri 2007:11)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengumpulan, pemasukan data dan pengolahan data transaksi 2. Penyimpanan data transaksi 3. Pemberian informasi 4. Pengawasan 	<ul style="list-style-type: none"> -tingkat Akurat -Laporan yang benar -ketepatan - Keamanan - Kecepatan -kemudahan - kebenaran - Laporan - Kejujuran 	Ordinal Ordinal Ordinal Ordinal
Akuntabilitas Pendapatan Pajak Daerah (Variabel Y)	Kewajiban untuk memberikan tanggung jawab dalam menyajikan/melaporkan informasi realisasi penerimaan pendapatan pajak daerah kepada yang berwenang. (Abdul Halim 2004:52)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Akuntabilitas Kejujuran 2. Akuntabilitas Proses 3. Akuntabilitas Program 4. Akuntabilitas Kebijakan 	<ul style="list-style-type: none"> Penghindaran penyalahgunaan jabatan Pelaksanaan pekerjaan Tujuan tercapai - Penerimaan pajak - peraturan 	Ordinal Ordinal Ordinal Ordinal

Teknik sampling yang digunakan pada penelitian ini adalah *non probability sampling* yang merupakan teknik pengambilan sampel yang tidak memberikan peluang sama untuk dipilih menjadi sampel. Jumlah populasi yang pada penelitian ini relatif kecil, karena semua anggota populasi dijadikan sampel, maka metode yang digunakan dalam penarikan sampel adalah sampling sensus.

Menurut Sudjana (2009:124) menjelaskan mengenai pengertian sensus, yaitu sebagai berikut :“Sensus adalah apabila setiap anggota atau karakter yang ada di dalam populasi dikenai penelitian”.

Dari penjelasan diatas, dengan kata lain anggota populasi dianggap homogen. Jumlah populasi sebanyak 27 orang, karena penelitian ini menggunakan sensus maka jumlah sampel yang peneliti tentukan yaitu 27 orang.

3.2 Uji Validitas

Menurut Cooper (2006:720) validitas adalah:

”Validity is a characteristic of measuraenment concerned with the extent that a test measures what the researcher actually wishes to measure”.

Tabel 2 standar validitas

	Validity
--	-----------------

<i>Good</i>	0,50
<i>Acceptable</i>	0,30
<i>Marginal</i>	0,20
<i>Poor</i>	0,10

(Sumber: Barker et al, 2002:70)

3.3 Uji Reliabilitas

Menurut Cooper (2006:716) reliabilitas adalah:
 "Reliability is a characteristic of measurement concerned with accuracy, precision, and consistency".

Tabel 3 untuk Reliabilitas

	Reliability
<i>Good</i>	0,80
<i>Acceptable</i>	0,70

(Sumber: Barker et al, 2002:70)

3.4 Analisis Korelasi Pearson

Analisis koefisien korelasi *Pearson* digunakan untuk mengukur ada atau tidaknya hubungan *linier* antara variabel bebas (X) dan variabel terikat (Y) serta mempunyai tujuan untuk meyakinkan bahwa pada kenyataannya terdapat hubungan antara Sistem Informasi Akuntansi dengan Akuntabilitas Pendapatan Pajak Daerah,

Koefisien korelasi mempunyai nilai $-1 \leq r \leq +1$ dimana :

1. Apabila $r = +1$, maka korelasi antara kedua variabel dikatakan sangat kuat dan searah, artinya jika X naik sebesar 1 maka Y juga akan naik sebesar 1 atau sebaliknya.
2. Apabila $r = 0$, maka hubungan antara kedua variabel sangat lebar atau tidak ada hubungan sama sekali.
3. Apabila $r = -1$, maka korelasi antara kedua variabel sangat kuat dan berlawanan arah, artinya apabila X naik sebesar 1 maka Y akan turun sebesar 1 atau sebaliknya.

Untuk memberikan interpretasi koefisien korelasinya maka peneliti menggunakan pedoman sebagai berikut :

Tabel 4 Interpretasi Koefisien Korelasi

Interval Koefisien	Tingkat Hubungan
0,00 – 0,25	Korelasi sangat lemah (tidak ada)
>0,25 – 0,5	Korelasi cukup
>0,5 – 0,75	Korelasi kuat
>0,75 – 1	Korelasi sangat kuat

(Sumber:Jonathan Sarwono, 2005)

3.5 Analisis Regresi Linier Sederhana

Analisis regresi linier sederhana adalah metode analisis statistik yang digunakan untuk mengetahui besarnya pengaruh variabel independen (X) terhadap variabel dependen (Y). Dampak dari analisis regresi dapat digunakan untuk memutuskan apakah naik dan menurunnya variabel *dependent* (Akuntabilitas Pendaptan Pajak Daerah) dapat dilakukan melalui menaikkan dan menurunkan keadaan variabel *independent* (Sistem informasi Akuntansi). Atau dengan meningkatkan keadaan variabel *dependent*

(Akuntabilitas Pendapatan Pajak Daerah) dapat dilakukan dengan meningkatkan variabel *independent* (Sistem informasi Akuntansi). Dengan formulasi sebagai berikut :

$$Y = a + bX$$

(Sumber: Jonathan, 2005:73)

3.6 Koefisien Determinasi

Besarnya pengaruh variabel X terhadap variabel Y dapat diketahui dengan menggunakan analisis koefisien determinasi atau disingkat Kd, yang diperoleh dengan mengkuadratkan koefisien korelasi. Sehingga koefisien ini berguna untuk mengetahui besarnya kontribusi pengaruh penerapan sistem informasi akuntansi terhadap pendapatan pajak daerah, dengan menggunakan rumus sebagai berikut :

$$Kd = r_{yx}^2 \times 100\%$$

(Sumber: Jonathan, 2005:72)

3.7 Hipotesis

a. Hipotesis Penelitian

H_0 : Sistem informasi akuntansi tidak memiliki pengaruh dengan akuntabilitas pendapatan pajak daerah.

H_1 : Sistem informasi akuntansi memiliki pengaruh dengan akuntabilitas pendapatan pajak daerah

b. Hipotesis Statistik

Berdasarkan pada alat statistik yang digunakan dan hipotesis penelitian di atas maka peneliti menetapkan dua hipotesis yang digunakan untuk uji statistiknya yaitu hipotesis nol (H_0) yang diformulasikan untuk ditolak dan hipotesis alternatif (H_1) yaitu hipotesis peneliti yang diformulasikan untuk diterima, dengan perumusan sebagai berikut:

H_0 : $\rho = 0$, sistem informasi akuntansi tidak berpengaruh terhadap akuntabilitas pendapatan pajak daerah

H_1 : $\rho \neq 0$, sistem informasi akuntansi berpengaruh terhadap akuntabilitas pendapatan pajak daerah

Melalui patokan pengambilan keputusan menurut Jonatan Sarwono (54:2006)

1. Jika probabilitas atau signifikansi < 0,01, hubungan kedua variable signifikan.
2. Jika probabilitas atau signifikansi > 0.01, hubungan kedua variable

tidak signifikan.

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

Berikut ringkasan dari data hasil penelitian mengenai pengaruh penerapan sistem informasi akuntansi pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Bandung dengan menggunakan persentase skor tanggapan responden.

Tabel 5 Rekapitulasi Persentase Total Skor Tanggapan Responden Mengenai Penerapan Sistem Informasi Akuntansi

No.	Indikator	Skor	Skor	% Skor	Kriteria
		Aktual	Ideal	Aktual	
1	Pengumpulan, pemasukan data dan pengolahan data transaksi	450	540	83,33%	Baik
2	Penyimpanan data transaksi	449	540	83,5%	Baik
3	Pemberian informasi	557	675	82,5%	Baik
4	Pengawasan	440	540	81,5%	Baik
Total		1896	2295	82,6%	Baik

Sedangkan untuk tanggapan responden mengenai Akuntabilitas Pendapatan Pajak Daerah dapat dilihat dibawah ini adalah :

Tabel 6

Rekapitulasi Persentase Total Skor Tanggapan Responden Mengenai Akuntabilitas Pendapatan Pajak Daerah

No.	Indikator	Skor	Skor	% Skor	Kriteria
		Aktual	Ideal	Aktual	
1	Akuntabilitas Kejujuran	224	270	83%	Sangat baik
2	Akuntabilitas Proses	334	405	82,5%	Baik
3	Akuntabilitas Program	330	405	81,5%	Baik
4	Akuntabilitas Kebijakan	210	270	78%	Baik
Total		1098	1350	81%	Baik

4.1 Pembahasan

Jumlah responden dalam penelitian ini 27 orang, yang menjadi subyek penelitian adalah Bagian Keuangan dan Pajak. Teknik analisis yang digunakan pada pengolahan data berupa analisis kualitatif untuk menginterpretasikan hasil tanggapan responden melalui kuesioner. Untuk menguji pengaruh penerapan sistem informasi akuntansi terhadap akuntabilitas pendapatan pajak daerah digunakan analisis regresi linier sederhana.

Pembahasan merupakan perhitungan serta analisis dari data-data yang diperoleh dari perusahaan. Data-data yang terkumpul merupakan data primer karena diperoleh langsung dari tangan pertama melalui instrumen penelitian atau kuesioner.

4.2 Uji Korelasi

Tabel 7
Korelasi Antara Variabel X dengan Variabel Y

Correlations

		SIA	AKUNTABILITAS
SIA	Pearson Correlation	1	.907(**)
	Sig. (2-tailed)	.	.000
	N	27	27
AKUNTABILITAS	Pearson Correlation	.907(**)	1
	Sig. (2-tailed)	.000	.
	N	27	27

** Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

Berdasarkan hasil pengolahan di atas dapat dilihat bahwa koefisien hubungan antara variabel sistem informasi akuntansi dengan akuntabilitas pendapatan pajak daerah yang dihitung dengan koefisien korelasi adalah sebesar 0,907. Hal ini menunjukkan terdapat hubungan yang sangat kuat antara sistem informasi akuntansi dengan akuntabilitas pendapatan pajak daerah pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Bandung.

4.3 Uji Regresi

Tabel 8
Hasil Analisis Regresi

Coefficients(a)

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	1.938	2.435		.796	.433
	SIA	.513	.048	.907	10.767	.000

a. Dependent Variable: AKUNTABILITAS

Dari hasil perhitungan tersebut dapat dilihat bahwa koefisien regresi memiliki tanda positif, artinya semakin baik penerapan sistem informasi akuntansi akan membuat akuntabilitas pendapatan pajak daerah pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Bandung semakin baik. Demikian juga sebaliknya, semakin tidak baik penerapan sistem informasi akuntansi akan membuat akuntabilitas pendapatan pajak daerah pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Bandung semakin rendah.

Arti dari persamaan dalam bentuk penjelasan secara ekonomis yaitu untuk mengetahui Koefisien regresi sistem akuntansi keuangan daerah sebesar 0,513 menunjukkan besarnya perubahan pada variabel akuntabilitas pendapatan pajak daerah apabila variabel sistem informasi daerah berubah sebesar satu satuan. Jadi setiap kenaikan sistem akuntansi keuangan daerah sebesar satu satuan akan meningkatkan akuntabilitas pendapatan pajak daerah sebesar 0,513 atau sebaliknya. Sementara nilai konstanta sebesar 1.938 menunjukkan nilai rata-rata Y apabila X bernilai nol.

Standar error merupakan nilai penyimpangan dari angka yang di kolom B. Nilai beta sama dengan nilai korelasi, kemudian nilai t adalah statistik uji yang digunakan untuk menguji signifikansi koefisien regresi. Selain menggunakan uji t nilai signifikansi (sig.) juga merupakan statistik uji yang digunakan uji menguji signifikansi koefisien regresi. Kalau t dibandingkan dengan t tabel, maka nilai signifikansi dibandingkan dengan alpa penelitian yaitu 1% atau 0,01. apabila nilai signifikan < 0,01

artinya koefisien regresi yang sedang diuji signifikan, sebaliknya apabila nilai signifikan > 0,01 artinya koefisien regresi yang sedang diuji tidak signifikan.

4.4 Koefisien determinasi

Tabel 9

Koefisien Determinasi

Model Summary

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.907(a)	.823	.815	2.49267

a. Predictors: (Constant), SIA

Melalui data pada tabel di atas dapat dilihat bahwa nilai koefisien korelasi (R) adalah sebesar 0,907, jadi kedekatan hubungan antara variabel sistem informasi akuntansi dengan akuntabilitas pendapatan pajak daerah yang dihitung dengan koefisien korelasi adalah sebesar 0,907. Artinya terdapat hubungan yang sangat erat atau kuat antara sistem informasi akuntansi dengan akuntabilitas pendapatan pajak daerah.

Selain koefisien korelasi (R), pada tabel diatas juga dapat ditemukan nilai R-square sebesar 0,823 yang dikenal dengan istilah koefisien determinasi (KD).

$$KD = (0,823) \times 100\% = 82.3\%$$

Koefisien determinasi sebesar 82.3% menunjukkan besarnya pengaruh penerapan sistem informasi akuntansi terhadap akuntabilitas pendapatan pajak daerah pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Bandung. Sedangkan sisanya yaitu sebesar 17.7% dipengaruhi faktor lain di luar variabel yang diteliti yaitu pertanggungjawaban atas pengelolaan dana kepada otoritas yang lebih tinggi, transparannya laporan keuangan atau anggaran serta disiplin.

Melalui patokan pengambilan keputusan menurut Jonatan Sarwono (54:2006)

1. Jika probabilitas atau signifikansi < 0,01, hubungan kedua variable signifikan.
2. Jika probabilitas atau signifikansi > 0.01, hubungan kedua variable tidak signifikan.

Keputusan terlihat angka probabilitas hubungan antara variable sistem informasi Akuntansi dan akuntabilitas pendapatan pajak daerah sebesar 0.00. Angka probabilitas 0.00 < 0,01, maka ada hubungan kedua variable tersebut signifikan. maka diputuskan untuk menolak H_0 dan menerima H_1 , jadi hasil pengujian menyimpulkan terdapat pengaruh yang signifikan penerapan sistem informasi akuntansi terhadap akuntabilitas pendapatan pajak daerah pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Bandung. Oleh karena itu, terbukti bahwa koefisien regresi adalah signifikan atau dengan kata lain sistem informasi daerah berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas pendapatan pajak daerah Pada Dinas Pendapatan Daerah.

V. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian mengenai, pengaruh Penerapan Sistem informasi Akuntansi terhadap Akuntabilitas Pendapatan Pajak Daerah pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Bandung, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Penerapan sistem informasi akuntansi pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Bandung menunjukkan kriteria Baik. Dikarenakan proses pengumpulan,

- pemasukan dan pengelolaan data transaksi disimpan dengan baik dan dapat memberikan informasi yang berguna bagi yang memerlukan.
2. Akuntabilitas pendapatan pajak daerah pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Bandung sudah termasuk dalam kategori baik. Artinya ditinjau dari akuntabilitas kejujuran, akuntabilitas proses, akuntabilitas program, walaupun dalam akuntabilitas kebijakan masih kurang, karena kebijakan-kebijakan yang diberikan terutama dalam hal pencatatan ada laporan keuangan dan anggaran pada hasil pendapatan pajak-pajak daerahnya pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Bandung. Tetapi hal ini tidak menutup kemungkinan bahwa akuntabilitas pada pendapatan pajak daerahnya secara keseluruhan sudah dilakukan serta dilaksanakan dengan baik. Sehingga dapat dipertanggungjawabkan kepada pihak yang berwenang.
 3. Berdasarkan hasil pengujian hipotesis diketahui bahwa sistem informasi akuntansi berpengaruh terhadap akuntabilitas pendapatan pajak daerah pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Bandung. Pengaruh penerapan sistem informasi akuntansi terhadap akuntabilitas pendapatan pajak daerah pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Bandung juga dipengaruhi oleh faktor lain di luar variabel yang diteliti. Variabel lain yang dapat mempengaruhi akuntabilitas adalah pertanggungjawaban atas pengelolaan dana kepada otoritas yang lebih tinggi dan harus lebih transparannya laporan keuangan atau anggaran serta peningkatan kedisiplinan kerja pegawai.

VI. DAFTAR PUSTAKA

- Bastian Indra. 2007. *Sistem Akuntansi Sektor Publik*. Jakarta. Salemba Empat
- Kusrini, M.Kom. Dan Andri Koniyo. 2007. *Tuntunan Praktis Membangun Sistem Informasi Akuntansi dengan Visual Basic dan Microsoft SQL Server*. STIMIK AMIKOM. Andi. Yogyakarta.
- Mardiasmo. 2002. *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta. CV Andi.
- Sri Dewi Anggadini, SE., M.Si. Dan Lilis Puspitawati, SE., M.Si. 2008. *Sistem Informasi Akuntansi*. Modul Unikom. Unikom. Bandung.
- Sugiyono. 2007. *Metode Penelitian Bisnis*. Bandung. Alfabeta.
- Sugiyono. 2009. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sudjana. 1989. *Metode Statistika*. Bandung. Tarsito.
- Umar, Husein. 2005. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Raja Grafindo.
- http://www.cari_ilmu_online_borneo.com/faktor-faktor_yang_mempengaruhi_implementation_akuntabilitas/ 10 Oktober 2008